

COVID-19 DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS, FIQH, DAN SAINS

Eka Mahargiani

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Jawa Tengah Indonesia
E-mail: mahargianieka@gmail.com

Ahmad Nur Afnan

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Jawa Tengah Indonesia
E-mail: abahshinta@gmail.com

Sumarjoko

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Jawa Tengah Indonesia
E-mail: sumarjoko.kusumo@gmail.com

ABSTRAK

Konsep negara dalam menciptakan kesejahteraan rakyatnya sangat variatif. Bahwa tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus sesuai kemaslahatan umat. Secara otoritatif pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat. Didukung dengan logika agama “*ta arruf al-Imâm ‘alâ ar-ra’iyah manû bi al-ma la ah*”. Begitu juga ketika terjadi wabah pandemi covid-19. Melalui kebijakan pemerintah terhadap pemberlakuan *social distancing*, *phsycal distancing*, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimungkinkan memberikan dampak buruk pada aktifitas sosial, ekonomi, politik dan budaya lokal serta Nasional. Demi penyelamatan kemanusiaan (bangsa) dari kepunahan, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut. Pada sisi lain, masyarakat juga dihadapkan berbagai persoalan kehidupan yang bertumpu pada wilayah agama. Ragam interpretasi yang muncul terkait dengan doktrin pertahanan diri (*survival*) dari pandemi yang berbeda-beda. *Pertama*, interpretasi teologis akan mengantarkan pada ketidaktakutan pada pandemi sehingga masih melakukan aktifitas keagamaan sebagaimana sebelumnya. Namun pandangan ini akan kontra produktif dengan protokol pemerintah dan kurikulum medis yang menganjurkan, *social distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). *Kedua*, intepretasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Logika fiqh ini lebih menekankan pentingnya mempertahankan diri untuk mencapai kesejahteraan jasmani (kesehatan)dalam melindungi jiwa tanpa menghilangkan nilai-nilai keimanan (esoterik) manusia kepada Khaliq. Interpretasi keagamaan yang rasional progresif inilah yang akan tepat menjadi solusi bangsa Indonesia dalam memutus mata rantai pandemi covid -19.

Kata kunci : Covid 19, negara, kesejahteraan, rakyat

A. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini logika teologis agama dihadapkan pada persoalan diskursus pandemik covid-19. Di Indonesia, berada pada tahap penyebaran virus corona (covid -19) yang telah

mewabah dibumi pertiwi (Alyasa’ Abu Bakar, 2020: 14). Belum ada keterangan, kapan pandemi ini akan berakhir. Ketika kedaan mulai normal, maka banyak orang mengabaikannya. Sehingga muncul kluster baru dan seterusnya. Karena

terlalu lama pandemi ini, sehingga dalam menghadapi isu global tersebut, banyak sikap non-Ilmiah beredar sebagai respon terhadap persoalan yang menjadi topik utama diberbagai media, baik skala lokal ataupun internasional.

Hal ini membangkitkan masyarakat secara umum, terutama dikalangan ilmunan, agamawan, telah banyak menyusun konstruksi berfikir, baik secara induktif, deduktif bahkan sintesa keduanya. Semisal munculnya konstruksi non-ilmiah dengan pendektan teologis terkait pemikiran klasik *jabariah* (fatalisme), *qadariyah* (*free will and act*), *mu'tazilah* dan *Asy'ariah*. Pendektan tersebut tentu tidak efektif karena tidak memiliki korelasi langsung terhadap eksistensi pandemik covid 19. Terutama dalam pengertian mencegah dan menghentikan penyebarannya (preventif). Spekulasi konstruksi non ilmiah tersebut justru kian memperkeruh dan menghambat penanganan atas protokol-protokol yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki otoritas. Semisal otoritas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), otoritas politik pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Masdar Hilmy, *Kompas*, April 2020).

Kebijakan pemerintah terhadap pemberlakuan *social distancing*, *phsycal distancing*, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimungkinkan memberikan

dampak buruk pada aktifitas sosial, ekonomi, politik dan budaya lokal serta Nasional. Meskipun demikian demi penyelamatan kemanusiaan (bangsa) dari kepunahan, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut. Secara otoritatif pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat. Didukung dengan logika agama pula, "*tasharraf al-Imami 'ala ar-ra'iyati manuuthun bi al-mashlahati*" (Jalaluddin Abd ar-Rahman as-Suyuthi, 1971:185). Bahwa tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus sesuai kemaslahatan umat (Sumarjoko, 2019:118). Konsep negara dalam menciptakan kesejahteraan rakyatnya sangat variatif (tidak tunggal) (Muchotob Hamzah, 2018:1). Sehingga dalam menjalankan hal tersebut pemerintah perlu membuat regulasi yang dinegosiasikan antara pihak pemerintah sendiri (pemegang otoritas publik dan politis), rakyat (pengguna) dan pihak-pihak ketiga baik investor asing, perusahaan domestik dan non domestik.

Dalam wilayah keagamaan, pandemi covid-19 menimbulkan dampak persoalan serius. Atas hal tersebut, banyak orang akan merasa takut, kuatir secara terus menerus. memiliki psikologi tersendiri terkait dengan rasa takut, pasrah dan berharap, serta dimaknai dengan berbagai pendekatan. Pendekatan teologis, hukum dan humaniora, sangat

kaya akan interpretasi teks-teks keagamaan dan manuskrip tergantung dari sudut mana hal tersebut makna. Para teolog Banyak perdebatan para ahli yang membahas tentang adanya dampak covid 19 ini dalam lingkaran kehidupan sosial agama berdampak pada masyarakat. ketakutan Adanya pandemi akan menjadikan negara tersebut justru mendapatkan hambatan berat dalam menjalankan kebijakan terkait protokol-protokol pemerintah dan medis terkait pemutusan mata rantai penularan virus corona.

Ketika pemerintah memberlakukan kebijakan *lock down* untuk menyelamatkan bencana global ini dengan memutus rantai penularan covid-19, maka tentu ada harga yang harus ditebus. Demikian pula ketika pemerintah melakukan vaksinasi dengan gencar, dalam memenuhi dan memberikan hak-hak secara materi kepada masyarakat dalam waktu tertentu. Apabila tidak terpenuhi maka kebijakan tidak akan jalan dan banyak pelanggaran-pelanggaran sosial yang akan dilakukan rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari yang vital. Untuk mempertahankan kehidupan rakyat akan melakukan aktivitas diluar. Apalagi dengan dukungan kultur religi yang kental mistik, dukungan-dukungan interpretasi personal yang tidak memiliki otoritas dalam memberikan kesimpulan-

kesimpulan yang berlawanan dengan lembaga otoritas terkait. Bahkan, banyak pula lembaga non otoritas yang memberikan penjelasan, interpretasi dan langkah-langkah tak rasional dalam menangani pandemik covid 19 (Khoiruddin Nasution, *Kedaulatan Rakyat*, April 2020).

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Politik Indonesia Kekinian

Pandemi corona virus (Covid-19) di Indonesia yang semakin meluas memberikan kecemasan secara kolektif apabila hal tersebut menjangkit terlalu lama di Indonesia. Covid-19 secara perlahan akan menggiring Indonesia pada potensi krisis di sejumlah lini strategis bahkan tidak menutup kemungkinan akan membawa Indonesia pada krisis ekonomi yang berbuntut pada krisis politik. Akibat politik global terkait dengan dampak pandemik covid 19, para politikus lokal saling menyudutkan. Para pimpinan berebut panggung untuk mendapatkan simpati masyarakat. Mereka saling berseberangan dan masalah virus justru disepelekan sehingga terjadi keterlambatan penanganan. Tak terlihat mekanisme antisipatif dan skema panganan terpadu dan intensif. Moral politik jatuh sehingga menjadi ajang pencitraan dan terjadi pengailan dalam sungai yang keruh. Beruntung masih ada

garda-garda medis yang melakukan perlawanan dan ormas-ormas keagamaan yang mendukung kebijakan Pemerintah dalam menjalankan peran publiknya. Pemerintah belum mengambil kebijakan lockdown seperti di China (Wuhan) namun *social distance* sebagai langkah awal untuk solusi sementara dan terakhir memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah tertentu hingga menemukan anti virusnya. Meskipun demikian diberbagai wilayah pedesaan secara mandiri melakukan upaya penanggulangan tersendiri sesuai dengan kemampuan SDM wilayah tersebut.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif fiskal berupa penghilangan pajak penghasilan selama 6 bulan ke depan bagi pekerja maupun perusahaan dalam upaya memelihara daya beli masyarakat. Namun demikian, tidak ada ukuran pasti sejauh mana kebijakan insentif tersebut mampu bekerja secara efektif. Apalagi, model kebijakan ini belum tentu dirasakan oleh segmen masyarakat non-urban seperti petani, nelayan, pengrajin, dan lain-lain. Lebih lanjut lagi, pengalihan fungsi anggaran untuk infrastruktur kesehatan akan berpengaruh pada anggaran belanja pada sektor lain yang akan dikurangi. Pasokan suplai baik dari dalam atau dari luar akan terganggu sehingga

meningkatnya biaya produksi. Biaya produksi meningkat seiring dengan melonjaknya permintaan namun sebaliknya dengan kapasitas yang terbatas. Hal tersebut juga dipengaruhi atas pemenuhan tenaga kerja untuk industri yang tidak memadai karena wabah yang melanda pegawai sehingga berpengaruh pada kapasitas produksi. Lebih lanjut, pandemi Covid-19 pada akhirnya mengakibatkan investasi dan konsumsi anjlok dan menurunnya nilai tukar rupiah. Jika berkaca terhadap fenomena global tersebut, maka pandemi Covid-19 tidak hanya dimaknai sebagai wabah penyakit global. Dalam konteks politik, Covid-19 adalah bencana politik yang tercipta secara alamiah (*by nature*). Hal ini juga sebagai ujian atas tingkat kepercayaan publik terhadap pemangku kekuasaan. Keterbukaan dan sikap responsif pemerintah akan membantu publik untuk berhenti berspekulasi di tengah keadaan yang dinamis tersebut. Adapaun efektivitas pemerintah dalam merespon ancaman pandemi juga akan menunjukkan sejauh mana simpati publik pada kekuasaan terus terpelihara. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kinerja pemerintah, pusat maupun daerah, dalam penanganan dan pencegahan penularan penyakit agar tidak meluas, dalam konteks geografis maupun dampak

multidimensi: ekonomi, politik dan sosial.

Akhir-akhir ini, kekuasaan akan semakin diguncang secara alamiah. Pemegang otoritas mulai dipertanyakan. Apalagi, terkait dengan beberapa isu politik nasional dalam beberapa hari terakhir semakin mempertajam indikasi ke arah tersebut. *Pertama*, adanya suatu wacana reshuffle kabinet. Terkait isu ini cukup luas diberitakan pada akhir Februari lalu. Sejumlah pengamat menilai bahwa kemunculan wacana ini terlalu dini. Bahkan sikap “gerah” presiden terhadap menteri kesehatan dalam merespon Covid-19. Akhirnya pernah menunjuk Ahmad Yurianto, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, sebagai jubar resmi pemerintah untuk penanganan kasus Corona.

Kedua, Adanya suatu yang mengindikasikan gerakan masyarakat sipil semakin solid dan berkesinambungan. Gerakan massa tersebut biasanya bersifat informal, menggunakan perangkat komunikasi yang baru, dan memiliki watak ofensif kepada aparatur negara. Masyarakat semakin cerdas dalam politik sehingga mereka lebih kritis pada isu yang menyangkut hajat hidup mereka. Pemerintah pusat tidak perlu menaruh kecurigaan politis dengan pemerintah

daerah yang mengambil tindakan inisiatif lebih awal. Pemerintah daerah juga perlu mengedepankan koordinasi yang baik di awal dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan strategis di wilayah. Agar bisa saling sinergis dan tidak saling curiga. Di Indonesia seringkali terjadi adanya kesenjangan terhadap peranan negara dengan kehidupan warga negara. Permasalahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya misalnya, seringkali terjadi karena adanya kesenjangan, ketidakpercayaan antara perana negara serta kehidupan warga negaranya (Sutrisno Asyafiq, 2019:26). Apalagi pada saat terjadi pandemi sebagaimana akhir-akhir ini. Oleh karena itu, keselamatan dan perlindungan terhadap warga negara perlu diutamakan. Kepercayaan publik pada kekuasaan akan terpelihara dengan sendirinya seiring dengan kehadiran negara di tengah mereka. Segala kebijakan yang berorientasi pada kemanusiaan pada akhirnya akan menciptakan keselamatan bagi sebuah negara. Dalam situasi krisis ini, respon yang tepat dari pemerintah akan menghasilkan kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara.

2. Perkembangan Ekonomi Lokal

Goncangan pada level ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19 sangat berpengaruh pada perekonomian global.

Pertumbuhan Ekonomi ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak (Arsyad Lincoln, 1997:46). Sebaliknya, menurut laporan yang dirilis oleh Organisasi Kerjasa Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Cooperation Development*) pada Maret 2020, bahwa GDP (*Gross Pruduct Domestic*) global diprediksi akan jatuh sebesar 2,4% pada 2020. Bahkan pertumbuhan GDP riil Indonesia menyusut sebesar 0,2% dimana sebelumnya berkisar di angka 5%. Berdasarkan laporan yang sama, bahwa Cina sebagai tempat awal persebaran Covid-19 telah memainkan peran penting dalam ekonomi global. Secara persentase, industri China memberi sumbangsih berkisar 22% terhadap ekonomi global, kemudian diikuti oleh GDP dan perdagangan global dimana masing-masing memberikan kontribusi sebesar 17% dan 10%.

Selain itu, China dikenal sebagai pusat produksi barang dunia dan telah memberikan sumbangsih sebesar 12,8% terhadap produksi barang dunia. Alhasil, ketika produksi barang di China terhambat maka akan mempengaruhi suplai terhadap permintaan global.

Jumlah penawaran yang lebih kecil ketimbang permintaan akan menimbulkan kenaikan harga dari batas wajar. Terkait hubungannya dengan Indonesia, China memberikan pengaruh signifikan pada sektor perdagangan, pariwisata, dan komoditas lain. China adalah salah satu negara *supplier* bahan baku terbesar bagi industri manufaktur di Indonesia. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menerangkan, hampir 74% bahan baku industri di Indonesia diimpor dari negeri tirai bambu tersebut. Pada sisi lain, terkait dengan pariwisata covid -19 juga memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Dari jumlah sekitar 13,6 juta wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia, bahwa turis Cina menempati posisi kedua terbanyak. Sejak wabah Covid-19 merebak, angka wisatawan asing dari China menurun drastis, terlebih sejak diberlakukannya *travel ban* dari pemerintah Indonesia. Kebijakan ini terpaksa dilakukan sebagai tindakan mitigasi kendati langkah tersebut disesalkan oleh duta besar China untuk Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran wabah Covid-19 memberikan dampak secara sistemik terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Pengaruh pandemi covid 19 saat ini berdampak di berbagai sektor kehidupan sosial masyarakat baik sektor

pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya maupun ekonomi.

Secara khusus dalam bidang tertentu yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat Indonesia adalah kelangkaan barang. Akibat dibalik ancaman pandemik covid 19 dan kepanikan global membuka wacana baru dalam pasar lokal. Lendakan permintaan barang skala ringan pencekal virus semisal masker, hand sanitizer, dan sejenisnya, semakin melambung. Bahkan hal yang krusial terkait dengan harga Alat Pelindung Dokter (APD) perlu ada peran pemerintah dalam mengatur harga normal dan batas harga tertentu. Ketidakterkendalian ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pasar antara permintaan dan penawaran. Dalam teori ekonomi tingginya permintaan meningkatkan harga komoditas. Paradigma ekonomi lama dengan prinsip “asal bisa beli murah” tak dapat dipertahankan.

3. Ragam Interpretasi Keagamaan

Eratnya korelasi antara hukum Islam dengan masyarakat muslim menjadikannya sebagai bagian yang cukup urgen (Anton Widyanto, 2011:82). Hadirnya suatu pandemik (wabah) sering menimbulkan suatu interpretatif terhadap teks-teks keagamaan. Hal tersebut untuk menggambarkan suatu kausalitas yang

dihubungkan dengan logika agama itu sendiri. Baik corak fiqh/syariah ataupun teologis. Interpretasi tersebut berbeda-beda sesuai kemampuan logika masing-masing. Bagi pribadi agamis, tertentu melihatnya sebagai bagian dari ujian, cobaan, hukuman, takdir, edukasi (*ta'dib*), dan lainnya. Ungkapan teologis keagamaan semisal, “saya lebih takut pada Tuhan dari pada pandemik covid-19, karena mati sudah ada garisnya”. Ucapan yang demikian sekilas benar. Orang tersebut membenturkan teologis agama dengan logika murni, sehingga terjadi suatu anakronik terhadap teologi keagamaan. Anakronik teologi keagamaan ini memungkinkan terjadinya kontra-produktif terhadap protokol medis terhadap pemutus penghentian pandemik covid-19 yang dilakukan oleh tim-tim medis yang berupaya menangani dan menjinakannya. Dalam agama Islam, tidak diperbolehkan mempersulit diri sendiri dan tidak boleh pula mempersulit orang lain. Oleh karena itu logika rasional *fiqh* terumuskan “*al-Dlarraru Yuzalu*” (Jalaluddin Abd ar-Rahman as-Suyuthi, 1971:132) atau darurat itu harus dihilangkan. Ada dua logika dalam memahami hal ini, diantaranya:

a. Logika Rasional Fiqh

Esensi agama dalam paradigma syariah adalah menjaga kemanusiaan (antroposentris) dari hal-hal yang

merusak. Agama adalah jalan keselamatan baik secara fisik (lahiriyah) ataupun spiritual (esoterik). Hal-hal yang sifatnya kemanusiaan tersebut terformulasi dalam *maqashid asy-Syariah* atau *al-ahkam al-khamsah*: menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Agama Islam memelihara jiwa yang berkaitan kesehatan. Ini dapat dipahami, bahwa syariat Islam itu dibangun di atas pondasi (dasar) kemaslahatan manusia dan untuk kebahagiaan hidup di dunia ataupun akhirat (Yusno Abdullah Ota, 2016:47).

Agama Islam juga lebih mendahulukan sisi kemanusiaan meskipun terkadang seimbang. Oleh karena itu terkadang fiqh memberikan keringanan berkaitan dengan ibadah demi menjaga keselamatan jiwa manusia. Kelima hal yang menjadi tujuan syariah tersebut didalamnya mengandung banyak kemaslahatan umat manusia. Tujuan *maqashid* ini menurut asy-Syatibi dapat dilihat dari dua segi yaitu, tujuan syara' itu sendiri dan tujuan kepada *mukallaf* (Abu Ishaq Asy-Syathibi, 2005:63). Berkaitan dalam menghadapi pandemik covid 19 tersebut, empat dari lima hal tersebut senada dengan kurikulum medis. Dimana menurut otoritas medis, hingga saat ini diakui

belum ada vaksin yang dapat mencegah atau menghentikan covid 19. Upaya yang dilakukan semata hanya tindakan preventif untuk menghindarkan diri agar tidak terinfeksi. Caranya menggunakan langkah-langkah ilmiah dalam kurikulum medis. Dalam paradigma fiqh terdapat logika rasional, "*Daf'u al-Mafasidi muqaddamun 'ala al-Jalbi al-Mashalih*". Dalam terjemahan bebas, menolak kerusakan itu didahulukan daripada mengambil kebaikan atau kemanfaatan. Berdasarkan logika diatas, bahwa cara efektif memutus mata rantai pandemik covid 19 tersebut sebagaimana kurikulum medis yang diregulasikan pemerintah adalah jaga jarak aman, pakai masker, cuci tangan dengan sabun. Bahkan dibelakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Alasannya karena penularan virus ini adanya kontak badan dan tetesan air liur atau bersin para penderita.

Logika rasional fiqh tentu menuai reaksi sebagian masyarakat beragama. Karena agama melihat pandemik bukan hanya satu sisi. Masih banyak disimplin ilmu keagamaan lain terutama terkait dengan hal-hal yang sifatnya keimanan. Di Indonesia, keragaman dalam hal geografis

pendukunya, ekspresi sosio kultural, ekonomi dan politik tidak memungkinkan untuk merumuskan teori tunggal (Arijulmanan, 2017:403-422). Sehingga banyak anakronik-anakronik teologis bertebaran untuk membungkam pandangan fiqh tersebut. Apalagi dalam konteks ke-Indonesiaan, logika rasional fiqh ini didukung secara kelembagaan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maka narasi ini makin membubung tinggi ketika MUI mengeluarkan fatwa No.14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid -19.

Dalam fatwa tersebut MUI menyerukan untuk meniadakan sholat jum'at dan ibadah berjamaah lainnya di masjid yang terletak di zona merah covid 19. Meskipun demikian tidak dipungkiri pula dalam paradigma fiqh tersendiri terdapat banyak kelemahan, terutama dalam persoalan ijtihadiah. Masih banyak pula ulama yang berbeda dengan pandangan diatas. Perbedaan ini terletak pada sudut pandang atas interpretasi pada persoalan tingkat atau ukuran terhadap konsep “darurat” pada objek kajian. Oleh karena kembali pada esensi karakter hukum Islam yang bersifat dinamis, fleksibel, dinamis, kreatif dan responsive terhadap realitas objeknya.

Dengan demikian, realitas sosial perlu diakomodasikan oleh fiqh. Sebagaimana pendapat Ibn Taimiyyah, bahwa masalah-masalah riil yang berhubungan dengan umat Islam sehari-hari itulah yang harus diperhatikan, bukan masalah skolastik yang bersifat formalistis (Muhammad Amin, 1991:27). Upaya memunculkan perspektif baru dalam berfikir merupakan bagian dari apresiasi terhadap peninggalan fuqaha masa lalu (Zubaidi, 2006:435).

Dalam realitas sosial yang terjadi, beberapa kasus logika rasional fiqh selalu senada dengan logika medis. Sikap ilmiah menjadi langkah strategis dalam memahami dan merespon pandemik covid-19. Hal ini mengejawantah pada wujud logika induktif sebagai mekanisme dalam memaknai realitas sosial. Logika induktif merupakan suatu mekanisme kognitif atas sebab akibat berdasarkan pada realitas empiris dalam kehidupan masyarakat. Logika induktif yang belaku adalah argumentasi aposteriori (*evidence-based*) yaitu argumentasi yang dibangun dari serangkaian fakta empiris dan telah diujikan secara ketat dilaboratorium atau realitas empiris. Mengutip bahasa klasik Ibnu Taimiyah (w. 1328), “suatu kebenaran itu terletak pada realitas kehidupan,

bukan pada akal pikiran (*al-haqiqah fi al-a'yan laa fi ad-dzan*). Logika ini sama dengan logika rasional fiqh yang diterapkan pada penyelidikan reproduksi wanita. Dengan demikian, apabila suatu persoalan itu terlihat logis, namun tidak didukung oleh fakta empiris maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan konklusi dalam menangani pandemik covid-19.

b. Logika Teologis Keagamaan

Saat ini logika teologis agama dihadapkan pada persoalan diskursus pandemik covid-19. Dalam menghadapi isu global ini, banyak sikap non-Ilmiah beredar sebagai respon terhadap persoalan yang menjadi topik utama diberbagai media, baik skala lokal ataupun global. Hal yang harus dipikirkan dan disadari adalah antisipasi terhadap resiko tingkat moralitas akibat hadirnya faktor-faktor yang dapat memperlambat atau memperburuk penanganan atas pandemi covid-19 yang telah beredar secara viral di masyarakat. Hal tersebut tambahkan dengan perspektif terhadap anakronik teologis yang beredar. Anakronik teologis keagamaan bagian dari interpretasi keagamaan yang tidak bisa dipungkiri. Sebagian tokoh muslim juga memungkinkan terjadinya kontra-

produktif terhadap protokol medis terhadap pemutus penghentian pandemik covid-19 yang dilakukan oleh tim-tim medis. Setidaknya para medis berupaya menangani dan menjinakkannya. Teologi kematian yang disuarakan seorang pimpinan agama mempunyai pengaruh yang sangat signifikan. Mengutip Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi *Bismillâhila î lâ ya urru ma'asmihî syai'un fî al Ar i walâ fî as-Samâ`i wahuwa as-Samî'un alîm* (Khoiruddin Nasution, Kedaulatan Rakyat, 3 April 2020). Dalam terjemahan bebas, teks tersebut diartikan, “Dengan menyebut nama Allah yang bersama nama-Nya sesuatu apapun tidak akan celaka baik di bumi atau dilangit. Dialah Yang Maha Mendengar ladi Maha Mengetahui”.

Teks doa ini juga banyak diinterpretasikan ulama muslim secara berbeda. Hakikat doa adalah memohon perlindungan pada Allah dari persolan yang sulit dan menakutkan. Dalam menjalankan protokol kesehatan, maka seorang ahli (ilmuan), dokter, perawat dan Satgas-Satgas yang diberikan otoritas untuk sebagai pemutus pandemik covid 19 sangat dianjurkan untuk membacanya. Mereka berperang melawan bahaya

besar. Namun bagi pribadi tertentu melakukan ritual-ritual keagamaan secara komersil justru akan menjadi kontra-produktif dengan kurikulum medis. Ini seperti halnya orang yang melemparkan dirinya kedalam api menyala dan yakin, bahwa api tersebut tidak akan membakarnya jika Allah belum menghendaki. Tentu ini akan sia-sia karena melawan hal-hal yang sifatnya “*issiyah*” (Sumarjoko, 2015:3) atau alamiah (*sunatullâh*) (Al Yasa` Abubakar, SerambiNews.com, 28 Maret 2020). Ditambah lagi hadirnya teologi klasik *jabbâriyah* (determinisme) di pada era post-modern.

Manusia diibaratkan seperti kapas yang berterbangan dan tidak memiliki daya apapun jika Allah menghendaki dan memberikan daya. Atas teologi ini, seseorang yang ditakdirkan hidup maka tentu orang tersebut tidak akan mati dalam menghadapi situasi apapun. Dengan menjadikan pemikiran demikian, maka orang akan aktif berkeliaran, bergerombol dan tetap aktif dalam lingkungan apapun dan dimanapun tanpa resah dan takut terhadap keadaan. Inilah kelemahan pendekatan teologis dalam memutus mata rantai pandemik covid-19. Pengambilan konklusi model ini senada dengan logika deduktif.

Realitas normatif yang jika digunakan untuk justifikasi pada realitas empiris tidak menjadi sejalan (diakronistik) dengan konteks ruang dan waktu tertentu. Konsekkuensinya adalah menderivasikan teks-teks suci untuk menjustifikasi realitas pandemik covid-19. Argumentasi ini bersifat apriori.

Mengikuti pemikiran Immanuel Kant, argumentasi apriori merupakan logika matematis-logis dari sebuah konstruksi suatu konsep berpikir tertentu. Dengan demikian alangkah baiknya hal-hal tersebut diserahkan ahlinya yaitu orang-orang yang memiliki kompetensi terhadap medical saintifik. Upaya *medical* saintifik dalam menaggulagi pandemi adalah upaya riset yang menghasilkan suatu vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Oleh karena itu, program pemerintah terhadap vaksinasi sangat penting. Agar seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar penyakit tersebut maka yang bersangkutan tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan (aladokter.com). Hal ini dikuatkan dengan terbitnya, Permenkes RI

Nomor 84 tahun 2020 pasal 1 ayat 3, bahwa pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan suatu kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpapar penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pandemi covid-19 ini sangat mempengaruhi ekonomi dan politik baik skalan global atau lokal. Pengaruh politik global dapat dilihat dari sisi hubungan antar negara yang berdampak pada kebijakan perekonomian terkait menurunnya ekspor dan impor komoditas tertentu. Hal ini juga mempengaruhi politik lokal yang akhirnya mampu menekan nilai tukar rupiah hingga semakin buruk. Pada sisi lain, masyarakat juga dihadapkan berbagai persoalan kehidupan yang bertumpu pada wilayah agama. Ragam interpretasi yang muncul terkait dengan doktrin pertahanan diri (*survival*) dari pandemi juga berbeda-

beda. *Pertama*, interpretasi teologis akan mengantarkan pada ketidaktakutan pada pandemi sehingga masih melakukan aktifitas keagamaan sebagaimana sebelumnya. Namun pandangan ini akan kontra produktif dengan protokol pemerintah dan kurikulum medis yang menganjurkan, *social distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). *Kedua*, intepretasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Interpretasi kedua ini lebih progresif dan sejalan dengan langkah-langkah pememerintah dan anjuran medis dalam mempertahankan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan semisal pelaksanaan vaksinasi. Logika fiqh ini lebih menekankan pentingnya mempertahankan diri untuk mencapai kesejahteraan jasmani (kesehatan)dalam melindungi jiwa tanpa menghilangkan nilai-nilai keimanan (esoterik) manusia kepada Khaliq. Interpretasi keagamaan yang rasional progresif inilah yang akan tepat menjadi solusi bangsa Indonesia dalam memutus mata rantai pandemi covid-19.[]

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Muhammad. *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih Islam*. Jakarta: INIS, 1991.

Arijulmanan, A., 2014. Dinamika Fiqh Islam Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2(04), 403-422.

- Asyafiq, S., 2019. Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Di Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan. *J. Pendidik. Ilmu Sos*, 28(1), 18-30.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwaafaqat*. Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Alyasa', Abu Bakar. 2020. Memahami Corona Sebagai Takdir Allah. Aceh.tribunnews.com. Serambi Indonesia, 28 Maret 2020.
- Hamzah, Muchotob. 2018. *Agama dan Negara: Diskursus dan Praktik Politik Islam*. Ed. I. Jogjakarta: LKiS.
- Hilmy, Masdar. *Sikap Ilmiah Menghadapi Pandemi*. Kompas, April 2020.
- Jalaluddin Abd ar-Rahman as-Suyuthi. *al-Asybah wa an-Nazhair*. Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1971.
- Lincoln, Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*. Jogjakarta: STIE YKPN, 1997.
- Meva Nareza. 2021. *Mengetahui Manfaat Vaksin Covid19 dan Kelompok Penerima Prioritasnya*. 19 April 2021.
<https://www.alodokter.com/mengetahui-manfaat-vaksin-covid-19-dan-kelompok-penerima-prioritasnya>.
- Nasution, Khoiruddin. 2020. *Saintifik-Spiritual Hadapi Covid-19. Kedaulatan Rakyat*. April 2020.
- Ota, Y.A., 2016. Istihsan (Telaah Sosiologi-Kultural Pemikiran Imam Hanafi). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2), 14-23.
- Sumarjoko. *Ikhtishar Ushul Fiqh I*. Jogjakarta: Trussmedia, 2015.
- . *Kaidah Bahasa Arab*. Ed. I. Semarang: Pilar Nusantara, 2019.
- Widyanto, A., 2011. Pengembangan Fiqh di Zaman Modern. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. 10(2). 82-100.
- Zubeidi, Z.2006. Membangun Fikih Yang Berorientasi Sosial: Dialektika Fikih dengan Realitas Empirik Masyarakat. *al-Jami'ah :Jurnal of Islamic Studies*, 44(2), 429-452.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2006.44.2429-452>.

